

Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Kampung Pengemis Kota Sukabumi

Munandi Saleh¹, Robi Ananda Prayoga²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sukabumi

e-mail: [1munandisaleh@ummi.ac.id](mailto:munandisaleh@ummi.ac.id), [2robianandaprayuga@gmail.com](mailto:robianandaprayuga@gmail.com)

Corresponding author: munandisaleh@ummi.ac.id

ABSTRAK

Informasi Artikel:
Terima: 15-11-2024
Revisi: 05-12-2024
Disetujui: 25-12-2024

Dinas Sosial Kota Sukabumi memiliki peran strategis dalam pemberdayaan pengemis melalui berbagai program rehabilitasi dan bantuan sosial. Namun, efektivitas program-program tersebut masih dipertanyakan, mengingat jumlah pengemis yang masih signifikan dan rendahnya tingkat partisipasi mereka dalam program pemberdayaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan kampung pengemis di Kota Sukabumi, mengidentifikasi jenis program yang telah diterapkan, serta mengevaluasi efektivitasnya dan hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pegawai Dinas Sosial Kota Sukabumi yang terlibat dalam program pemberdayaan serta perwakilan masyarakat kampung pengemis. Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah melakukan berbagai upaya pemberdayaan melalui pendekatan preventif, rehabilitatif, dan bantuan sosial. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sementara rehabilitasi dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan, bimbingan mental dan hukum, serta layanan rehabilitasi sosial. Selain itu, bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) juga diberikan kepada masyarakat miskin.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Pengemis, Dinas Sosial, Kota Sukabumi, Rehabilitasi Sosial*

ABSTRACT

The Sukabumi City Social Service has a strategic role in empowering beggars through various rehabilitation and social assistance programs. However, the effectiveness of these programs is still questionable, given the still significant number of beggars and the low level of their participation in empowerment programs. Therefore, this study aims to analyze the role of the Social Service in empowering beggar villages in Sukabumi City, identify the types of programs that have been implemented, and evaluate their effectiveness and the obstacles faced. This study uses a descriptive qualitative method with data collection

techniques in the form of in-depth interviews, field observations, and documentation. The informants in this study consisted of employees of the Sukabumi City Social Service who were involved in the empowerment program as well as representatives of the begging village community. The data was analyzed using interactive qualitative analysis methods that included data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that the Social Service has carried out various empowerment efforts through preventive, rehabilitative, and social assistance approaches. Preventive efforts are carried out through socialization and education to the community, while rehabilitation is carried out by providing skills training, mental and legal guidance, as well as social rehabilitation services. In addition, social assistance such as the Family Hope Program (PKH) and Non-Cash Food Assistance (BPNT) are also given to the poor.

Keywords: Empowerment, Beggars, Social Service, Sukabumi City, Social Rehabilitation

PENDAHULUAN

Keberadaan pengemis di Kota Sukabumi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial, yang memiliki tanggung jawab dalam pemberdayaan dan rehabilitasi sosial (Handayani & Dwiastanti, 2019). Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang menjadi landasan bagi upaya pengentasan masalah pengemis (Hidayat & Setiawan, 2019). Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini masih perlu dikaji lebih lanjut mengingat jumlah pengemis yang tetap eksis dan kurangnya perubahan signifikan dalam pola hidup mereka. Selain itu, data dari Dinas Sosial Kota Sukabumi menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan jumlah pengemis dari tahun 2021 ke 2022, masih terdapat kesenjangan antara data resmi dan realitas di lapangan (Santosa & Wulandari, 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa program pemberdayaan yang telah dilakukan mungkin belum berjalan secara optimal atau kurang menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Ditemukan fenomena yang cukup menarik yaitu fenomena kampung pengemis yang berada di Jl. KH. Ahmad Sanusi No. 92, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, yaitu dimana hampir seluruh penduduk di kelurahan tersebut mencari penghasilan lewat mengemis (Gaventa & Barrett, 2018). Fenomena pengemis di Karang Tengah bukan hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan pola pikir masyarakat yang menganggap mengemis sebagai profesi yang lebih menguntungkan dibandingkan pekerjaan lain (Cornwall & Rivas, 2015). Dengan penghasilan yang bisa lebih besar dibandingkan upah minimum, banyak individu yang enggan beralih ke pekerjaan yang lebih produktif. Dinas Sosial telah melakukan berbagai program pemberdayaan, termasuk pelatihan keterampilan, bantuan sosial, dan rehabilitasi mental (Amalia, 2022). Namun, efektivitas program ini masih menjadi pertanyaan besar. Apakah program ini berhasil mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat? Apakah ada faktor penghambat dalam implementasi program pemberdayaan tersebut?

Pemerintah Kota Sukabumi dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan tentang penanganan untuk mengurangi atau meniadakan pengemis melalui Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Prasetyo & Nurhadi, 2021). Dinas Sosial merupakan sebuah lembaga yang memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah serta menanggulangi angka kemiskinan, melaksanakan pemberdayaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Wagle, 2018). Selain itu Dinas Sosial juga melaksanakan peran sebagai pelaksana daerah dibidang sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan berupaya untuk mengatasi permasalahan sosial dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat (Putri & Nugroho, 2020). Dinas Sosial mempunyai wewenang dalam mengimplementasi perda khususnya pada permasalahan sosial yang diantaranya adalah permasalahan pengemis ini dirasa belum optimal (Mosedale, 2016).

Penelitian tentang peran Dinas Sosial dalam menangani pengemis telah dilakukan di berbagai daerah. Misalnya, penelitian di Banyumas menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan melalui upaya preventif, represif, rehabilitatif, dan bimbingan lanjut telah dilakukan, namun hasilnya belum optimal (Amalia, 2022). Sementara itu, penelitian di Makassar mengungkapkan bahwa kendala utama dalam pemberdayaan pengemis adalah kurangnya fasilitas rehabilitasi dan pelatihan keterampilan (Handayani & Dwiastanti, 2017). Fenomena ini memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi sejauh mana peran Dinas Sosial dalam menangani permasalahan pengemis, serta bagaimana strategi yang lebih efektif dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini secara berkelanjutan (Fox, 2019; Osuji, 2020). Namun, penelitian yang secara spesifik membahas kasus kampung pengemis yang secara ekonomi tergolong mampu tetapi tetap memilih mengemis masih terbatas. Kesenjangan ini menjadi alasan utama perlunya penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana strategi pemberdayaan dapat diterapkan secara lebih efektif di Kota Sukabumi, serta faktor-faktor apa yang menghambat keberhasilan program yang sudah berjalan. Dari latar belakang, fenomena dan adanya kesenjangan penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan yang telah dilaksanakan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** untuk menggali secara mendalam bagaimana peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan kampung pengemis di Kota Sukabumi (Forrest & Mocek, 2012). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara lebih holistik dan mendalam, dengan fokus pada pengalaman, kebijakan, dan dampak program pemberdayaan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang realitas sosial yang terjadi di Kampung Pengemis,

khususnya terkait pola pikir masyarakat, implementasi program pemberdayaan, serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam menangani masalah ini (Creewell, 2017). Dengan metode ini, peneliti dapat memahami secara langsung bagaimana proses pemberdayaan dilakukan dan sejauh mana efektivitasnya dalam mengubah pola hidup masyarakat.

Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang komprehensif dan valid, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- **Wawancara Mendalam (In-depth Interview)**

Wawancara dilakukan dengan **informan kunci** dari Dinas Sosial Kota Sukabumi dan pihak terkait, seperti pekerja sosial, petugas rehabilitasi, serta masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi tentang kebijakan, program, kendala, serta dampak pemberdayaan terhadap kampung pengemis.

- **Observasi Lapangan**

Observasi dilakukan untuk memahami kondisi sosial, budaya, serta pola kehidupan masyarakat di Kampung Pengemis. Peneliti mengamati langsung bagaimana masyarakat berinteraksi dengan program pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Sosial. Observasi ini mencakup kondisi fisik lingkungan kampung pengemis, interaksi masyarakat dengan program pemberdayaan, respons masyarakat terhadap upaya rehabilitasi dan bantuan sosial.

- **Dokumentasi**

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber tertulis, seperti laporan tahunan Dinas Sosial, kebijakan pemerintah daerah, regulasi terkait, serta arsip kegiatan pemberdayaan. Selain itu, dokumentasi juga mencakup foto, video, serta bukti tertulis lainnya yang mendukung analisis penelitian

Informan

Informan dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam program pemberdayaan, baik sebagai pelaksana kebijakan maupun sebagai penerima manfaat. Informan dalam penelitian ini dipilih secara **purposive sampling**, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi yang relevan dan mendalam tentang topik penelitian. Informan utama dalam penelitian ini yaitu pegawai sosial bidang rehabilitasi sosial, pegawai sosial bidang rehabilitasi sosial, pegawai sosial bidang rehabilitasi sosial, warga kampung pengemis.

Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif interaktif berdasarkan model Miles dan Huberman (1994), yang mencakup tiga tahap utama:

- **Reduksi Data**

Menyeleksi, merangkum, dan menyaring data yang relevan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta mengelompokkan data berdasarkan tema utama, seperti kebijakan pemberdayaan, tantangan implementasi, dan respons masyarakat.

- **Penyajian Data**

Menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan kutipan wawancara. Membandingkan temuan dengan kebijakan yang telah diterapkan untuk melihat kesenjangan yang ada.

- **Penarikan Kesimpulan**

Menganalisis pola temuan untuk memahami sejauh mana peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan kampung pengemis. Dan mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan serta faktor-faktor yang menghambat keberhasilannya.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber (membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen) serta triangulasi waktu (mengumpulkan data dalam periode yang berbeda untuk memastikan konsistensi temuan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Sukabumi, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk program pemberdayaan bagi pengemis. Selain itu, penelitian juga berlokasi di Kampung Pengemis, yang terletak di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi.

Kampung Pengemis dikenal karena mayoritas penduduknya menjadikan mengemis sebagai sumber mata pencaharian utama, bukan karena keterbatasan ekonomi yang ekstrem, melainkan karena faktor mentalitas dan budaya. Meskipun banyak dari mereka memiliki rumah yang layak dan aset lainnya, mereka tetap memilih mengemis karena dianggap lebih menguntungkan daripada bekerja dalam sektor formal.

Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara dengan pegawai Dinas Sosial Kota Sukabumi, observasi langsung, dan studi dokumentasi, ditemukan beberapa temuan utama terkait peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan kampung pengemis.

Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Kampung Pengemis

Dinas Sosial Kota Sukabumi telah menerapkan beberapa program pemberdayaan untuk mengurangi jumlah pengemis dan membantu mereka mendapatkan keterampilan lain yang lebih produktif. Upaya ini dilakukan melalui dua pendekatan utama:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif dilakukan untuk mencegah peningkatan jumlah pengemis dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Beberapa bentuk upaya preventif yang dilakukan adalah:

- Sosialisasi langsung dan tidak langsung mengenai dampak negatif mengemis, baik kepada pengemis maupun masyarakat umum. Sosialisasi dilakukan di balai desa, sekolah, dan melalui media sosial.
- Pemasangan plakat dan spanduk di tempat-tempat strategis untuk mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan uang kepada pengemis, yang dapat memperkuat mentalitas ketergantungan.

2. Upaya Rehabilitatif

Upaya rehabilitatif bertujuan untuk membantu para pengemis memperoleh keterampilan baru agar dapat beralih ke pekerjaan lain yang lebih produktif. Program rehabilitasi yang dilakukan meliputi:

- Bimbingan Mental dan Spiritual: Dinas Sosial bekerja sama dengan lembaga keagamaan dan psikolog untuk memberikan bimbingan kepada para pengemis agar mereka memiliki pola pikir yang lebih positif terhadap pekerjaan produktif.
- Bimbingan Hukum: Para pengemis diberikan pemahaman tentang regulasi yang melarang mengemis dan diberikan informasi mengenai hak-hak mereka dalam mendapatkan kesejahteraan sosial.
- Pelatihan Keterampilan: Pelatihan yang diberikan meliputi menjahit, perbengkelan, dan keterampilan lain yang sesuai dengan minat pengemis. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pengemis dalam pelatihan ini masih rendah karena mereka merasa mengemis lebih mudah dan lebih menguntungkan.

3. Bantuan Sosial

Dinas Sosial juga menyediakan berbagai bantuan sosial bagi masyarakat miskin, termasuk pengemis yang ingin keluar dari lingkaran kemiskinan. Beberapa program bantuan yang diberikan meliputi:

- Program Keluarga Harapan (PKH)
- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)

Namun, berdasarkan temuan penelitian, banyak pengemis yang tidak masuk dalam kriteria penerima bantuan sosial karena mereka dianggap mampu secara ekonomi

Pembahasan

Hambatan dalam Implementasi Program Pemberdayaan

Meskipun berbagai program telah diterapkan, terdapat beberapa hambatan utama dalam pemberdayaan kampung pengemis, yaitu:

1. **Rendahnya Kesadaran dan Motivasi Pengemis:** Banyak pengemis yang tetap memilih mengemis meskipun sudah diberikan pelatihan keterampilan. Mereka merasa bahwa mengemis memberikan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan pekerjaan lain yang memerlukan usaha lebih.
2. **Kurangnya Fasilitas Rehabilitasi:** Dinas Sosial Kota Sukabumi tidak memiliki panti rehabilitasi khusus untuk menampung dan membina pengemis secara intensif. Akibatnya, program rehabilitasi hanya bersifat jangka pendek dan tidak memberikan dampak jangka panjang.
3. **Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga:** Dinas Sosial memerlukan kerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan untuk memberikan peluang kerja dan pendidikan bagi mantan pengemis. Namun, koordinasi antar lembaga ini masih belum optimal.
4. **Budaya Mengemis yang Sudah Mengakar:** Mengemis telah menjadi budaya di Kampung Pengemis, di mana praktik ini diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mengubah pola pikir masyarakat.

Evaluasi Efektivitas Program

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Dinas Sosial telah berupaya untuk memberdayakan pengemis, efektivitas program masih perlu ditingkatkan. Beberapa aspek yang perlu diperbaiki adalah; 1) Meningkatkan Intensitas dan Pendekatan Program Pelatihan: Pelatihan keterampilan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja agar lebih menarik bagi pengemis, serta memberikan insentif kepada peserta pelatihan untuk mendorong mereka berpartisipasi lebih aktif. 2) Membangun Panti Rehabilitasi: Panti rehabilitasi dapat menjadi tempat bagi pengemis untuk menjalani pembinaan secara lebih intensif sebelum kembali ke masyarakat. 3) Meningkatkan Koordinasi Antar Lembaga: Kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah dapat membantu dalam menciptakan peluang kerja bagi mantan pengemis. 4) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Kampanye publik yang lebih masif perlu dilakukan untuk mengurangi budaya memberi uang kepada pengemis, yang memperkuat pola ketergantungan mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan kampung pengemis di Kota Sukabumi telah berjalan, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan. Program yang telah diterapkan mencakup upaya preventif, rehabilitatif, dan bantuan sosial. Namun, efektivitasnya masih rendah karena beberapa hambatan, seperti rendahnya motivasi pengemis, kurangnya fasilitas rehabilitasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta budaya mengemis yang sudah mengakar. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, seperti penguatan pelatihan keterampilan, pembangunan panti rehabilitasi, dan kampanye publik yang lebih agresif dalam

mengubah pola pikir masyarakat. Disarankan untuk meningkatkan efektivitas program dengan strategi yang lebih komprehensif, seperti penguatan pelatihan keterampilan, pembangunan panti rehabilitasi, dan kampanye publik yang lebih agresif dalam mengubah pola pikir Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, S., & Santos, M. E. (2017). Multidimensional poverty index: 10 years of insights and progress. *World Development*, 94, 157-165. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.01.011>
- Amalia, L. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program pemberdayaan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Sosial dan Humaniora*, 10(2), 88-101.
- Cornwall, A., & Rivas, A. M. (2015). From 'gender equality and women's empowerment' to global justice: Reclaiming a transformative agenda for gender and development. *Third World Quarterly*, 40(9), 1789-1808. <https://doi.org/10.1080/01436597.2019.1568192>
- Cresswell, J. (2017). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches*.
- Forrest, J., & Mocek, L. (2012). Research design: qualitative, quantitative, and mixed method approaches. *Journal of Communications Media Studies*, 4(1), 179-181.
- Fox, J. A. (2019). Social accountability: What does the evidence really say? *World Development*, 72, 346-361. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011>
- Gaventa, J., & Barrett, G. (2018). So what difference does it make? Mapping the outcomes of citizen engagement. *IDS Working Papers*, 2018(423), 1-44. <https://doi.org/10.19088/IDS.2018.013>
- Handayani, S. W., & Dwiastanti, A. (2017). Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 11(1), 45-58.
- Hidayat, M. A., & Setiawan, B. (2019). Peran pemerintah daerah dalam penanganan gelandangan dan pengemis di kota besar Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 22(2), 110-125.
- Mosedale, S. (2016). Assessing women's empowerment: Towards a conceptual framework. *Journal of International Development*, 28(3), 393-411. <https://doi.org/10.1002/jid.3210>
- Osuji, O. K. (2020). Corporate social responsibility and poverty alleviation: The role of multinational corporations in emerging economies. *Journal of Business Ethics*, 162(3), 613-628. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3970-1>
- Prasetyo, D., & Nurhadi, F. (2021). Model pemberdayaan sosial berbasis komunitas di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 13(4), 67-80.
- Putri, R., & Nugroho, S. (2020). Pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal melalui program sosial pemerintah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(1), 50-64.
- Rahmawati, D. (2023). Dampak program bantuan sosial terhadap perubahan perilaku ekonomi masyarakat penerima manfaat di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 35-49.
- Santosa, B., & Wulandari, E. (2018). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan di daerah perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(3), 90-104.

Wagle, U. R. (2018). Multidimensional poverty measurement with economic well-being, capability, and social inclusion: A case from Kathmandu, Nepal. *Social Indicators Research*, 135(2), 637-665. <https://doi.org/10.1007/s11205-016-1508-9>